

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	7
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Koran Tempo	Wawasan
Tribun Jateng	Sindo	Republika	Kompas	

Halaman 1 dan 7

Polda Periksa Bupati Pekalongan

SEMARANG - Bupati Pekalongan Asip Kholbihi diperiksa sebagai saksi dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi insentif pegawai di RSUD Kraton Pekalongan. Ia dicecar 31 pertanyaan saat menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah di Semarang, Jumat (3/3).

Asip Kholbihi menjalani pemeriksaan saksi terkait dugaan korupsi pemotongan uang tunjangan jabatan struktural pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kraton, sebesar Rp 5,9 miliar, yang dilakukan oleh Direktur Rumah Sakit Kraton TG.



Pemeriksaan dilakukan sejak pukul 14.00 hingga pukul 17.00 WIB di Subdit Tipikor. Usai pemeriksaan pertama,

Foto: Dhani

Asip Kholbihi

Bersambung ke hal 7 kol 3

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Koran Tempo	Wawasan
Tribun Jateng	Sindo	Republika	Kompas	

Halaman 1 dan 7

Polda Periksa Bupati Pekalongan

Polda

(Sambungan hlm 1)

Asip mengaku lega. "Saya siap dan bersedia menjadi saksi tambahan berikutnya apabila diperlukan untuk penyidikan," kata Asip.

Asip mengaku dalam penyidikan Kholbihi, dalam pemeriksaan tersebut penyidik memberi 31 pertanyaan terkait tupoksi Bupati, kedudukan Bupati secara struktur. "Saya dilantik bulan juni 2016. Sedangkan proses pemeriksaan sendiri seputar mekanisme pengelolaan RSUD Kraton yang berkaitan dengan kebijakan keuangan," jelasnya.

Terkait menerima uang Rp.90 juta, juga sempat ditanyakan penyidik. Namun, diketahui uang yang diberikan bendahara RSUD Kraton pada saat menjabat, Asip tak menampiknya. "Memang saya pernah menerima Rp.90 juta dalam tiga kali penerimaan, namun sudah dikembalikan bulan Januari. Tapi sudah kami kembalikan semua pada bulan desember 2015," imbuhnya.

Asip menambahkan, siapapun yang sekarang diperiksa harus memberikan keterangan yang jujur. "Jadi

mengetahui kejadian itu, kami langsung melakukan pembenahan internal. Untuk kebijakan finansial Asip akan segera melakukan pembenahan RSUD Kraton termasuk penggantian banyak pejabat," ungkapnya.

Disinggung terkait dugaan dana yang digunakan untuk kegiatan Muspida, Asip tidak sepenuhnya membantah. Ia menjelaskan bahwa tidak semua anggaran digunakan untuk Muspida. "Tidak semua anggaran digunakan (Muspida)," ungkapnya.

Asip juga menyebutkan, sebagai bupati baru akan menata supaya BLUD punya dasar hukum yang kuat untuk semua jenis pengelolaan. Mulai dari keuangan, pelayanan kesehatan, dan rekrutmen tenaga kerja. Kesempatan ini juga digunakan Asip sebagai momentum untuk pembenahan internal.

"Ini kebijakan lama yang harus dikoreksi, sekaligus sebagai momentum untuk bersih-bersih di RSUD Kraton. Intinya siapapun yang sekarang diperiksa (terkait kasus ini) harus memberikan keterangan yang jujur. Saya bersedia memberikan keterangan tambahan jika diperlukan," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Reskrimsus Polda Jateng Kombes Pol Lukas Akbar Abriari mengatakan Bupati Pekalongan Asip Kholbihi diperiksa penyidik sebagai saksi terkait kasus tersebut. Namun dalam pemeriksaan belum menetapkan tersangka. "Penetapan tersangka belum ada. Tapi penyidik sudah ada satu nama yang dikantongi penyidik," terangnya.

Terkait penetapan tersangka, nanti kalau sudah ada hasil perhitungan dari BPK. "Tunggu hasil audit BPK dulu. Kalau dari hitungan penyidik kerugian mencapai Rp 5 miliar," katanya.

Pihaknya juga menegaskan akan memanggil semua pihak yang menerima uang hasil pemotongan insentif tersebut. "Kasus ini sejak tahun 2014. Kami akan periksa semua pihak yang menerima uang. Termasuk wakil Bupati Pekalongan," tegasnya.

Adapun dalam kasus ini, penyidik telah menerima uang pengembalian senilai total Rp 490 juta. Uang tersebut berasal dari mantan Bupati Pekalongan Ahmad Antono senilai Rp 400 juta dan Bupati Pekalongan Asip Kholbihi senilai Rp 90 juta. "Uang pengembalian tersebut kami sita dan dijadikan sebagai

barang bukti. Barang bukti lain adalah surat keputusan insentif tahun 2014," pungkasnya. ■ M17-yan